

Workshop Penggunaan Sistem Informasi Pembayaran SHP Versi 1.0 Koperasi Unit Desa (KUD) Hemat

Imam Saputra*, Kurnia Ulfa, Annisa Fadillah Siregar

Teknik Informatika, Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Budi Darma, Medan, Indonesia

Email: ¹saputraimam69@gmail.com, ²kurniaulfa82@gmail.com, ³annisa.fsir@gmail.com

(*: coresponding author)

Abstrak- Koperasi Unit Desa Hemat terletak di Desa Sinunukan IV yang merupakan sebuah desa yang berada kecamatan Sinunukan, kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara. Kecamatan ini termasuk kawasan pantai barat Sumatera Utara dengan komoditas utama masyarakatnya pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yaitu PT. Sago Nauli dan PT. Gruti. Koperasi Unit Desa Hemat bekerja sama dengan PT. Sago Nauli untuk mengolah hasil perkebunan kelapa sawit milik warga setempat dengan sistem perkebunan kelapa sawit plasma, yaitu perkebunan kelapa sawit milik warga yang perawatan dan pengembangannya dilakukan oleh PT. Sago Nauli melalui perantaraan Koperasi Unit Desa Hemat. Koperasi Unit Desa Hemat mengelola lahan seluas 684 kapling atau setara dengan 1368 hektar lahan kelapa sawit, dan memiliki anggota sebanyak 762 anggota aktif. Sisa Hasil Produksi (SHP) selalu di bagikan kepada anggota pemilik lahan sawit secara rutin di pertengahan bulan. Setiap anggota memiliki sebuah buku yang digunakan sebagai bukti sekaligus sebagai buku untuk menuliskan data pembagian SHP. Penulisan dalam buku tersebut masih menggunakan cara yang manual sehingga rentan terhadap kesalahan ataupun pemalsuan data. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang berbasis komputer untuk dapat meminimalisir kesalahan ataupun pemalsuan data. Kendala lain yang dihadapi adalah pasokan listrik yang kurang stabil dan sering padam menjadikan penggunaan barang-barang elektronik yang bersumber dari listrik rentan kerusakan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi yang handal yang dapat digunakan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang terjadi dan dapat bertahan dari kondisi pasokan listrik yang kurang stabil dan sering padam.

Kata Kunci: Sistem Informasi; Sisa Hasil Produksi; KUD Hemat

Abstract- Koperasi Unit Desa Hemat in collaboration with PT. Sago Nauli to process the results of oil palm plantations owned by local residents with a plasma oil palm plantation system, namely oil palm plantations owned by residents whose maintenance and development are carried out by PT. Sago Nauli through the mediation of Koperasi Unit Desa Hemat. manages 684 plots of land or the equivalent of 1368 hectares of oil palm land, and has 762 active members. The remaining Production Results (SHP) are always distributed to members of the oil palm land owners regularly in the middle of the month. Each member has a book that is used as evidence as well as a book to write down the distribution of SHP data. The writing in the book still uses a manual method so it is prone to errors or data falsification. Therefore a computer-based system is needed to minimize errors or falsification of data. Another obstacle faced is the unstable supply of electricity and frequent blackouts, making the use of electrically sourced electronic goods vulnerable to damage. Therefore, a reliable information system is needed that can be used to overcome errors that occur and can withstand unstable and frequent power outages. The implementation of this training program lasted for 2 days, due to the limited time of the participants in this community service activity. the implementation of activities is carried out at the Savings Village Unit Office. The training program is carried out by explaining as well as simulating the use of the SHP payment information system. By knowing and understanding the steps for using the Remaining Production Payment Information System (SHP), the management of the Cahaya Village Cooperative Unit no longer needs to record transactions manually to book members, printing member books can be done through the system that has been built.

Keywords: Information System; Rest Production; Unit Village Cooperation

1. PENDAHULUAN

Koperasi Unit Desa Cahaya merupakan salah satu koperasi unit desa yang terletak di desa Sinunukan IV, kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara. Koperasi Unit Desa Hemat bekerja sama dengan PT. Sago Nauli untuk mengolah hasil perkebunan kelapa sawit milik warga setempat dengan sistem perkebunan kelapa sawit plasma, yaitu perkebunan kelapa sawit milik warga yang perawatan dan pengembangannya dilakukan oleh PT. Sago Nauli melalui perantaraan Koperasi Unit Desa Hemat.

Koperasi Unit Desa Hemat mengelola lahan seluas 684 kapling atau setara dengan 1368 hektar lahan kelapa sawit, dan memiliki anggota sebanyak 762 anggota aktif. Sisa Hasil Produksi (SHP) selalu di bagikan kepada anggota pemilik lahan sawit secara rutin di pertengahan bulan. Setiap anggota memiliki sebuah buku yang digunakan sebagai bukti sekaligus sebagai buku untuk menuliskan data pembagian SHP. Penulisan dalam buku tersebut masih menggunakan cara yang manual sehingga rentan terhadap kesalahan ataupun pemalsuan data. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang berbasis komputer untuk dapat meminimalisir kesalahan ataupun pemalsuan data.

Kendala lain yang dihadapi adalah pasokan listrik yang kurang stabil dan sering padam menjadikan penggunaan barang-barang elektronik yang bersumber dari listrik rentan kerusakan. Oleh karena itu dibutuhkan

sistem informasi yang handal yang dapat digunakan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang terjadi dan dapat bertahan dari kondisi pasokan listrik yang kurang stabil dan sering padam.

Sistem informasi pembayaran SHP yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dengan database mysql. Aplikasi ini berbasis desktop dan di aplikasikan pada personal komputer berjenis laptop agar dapat bertahan dari pasokan listrik yang kurang stabil dan sering padam (Asinjery, 2020). Untuk dapat berkomunikasi antara komputer satu dengan yang lainnya maka menggunakan jaringan lokal atau Local Area Network menggunakan Kabel UTP dan Hub/Switch. Kendala lain yang disebabkan oleh pasokan listrik yang kurang stabil adalah penggunaan printer dot matrix yang bekerja bergantung pada aliran arus listrik. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan UPS (*Uninterrupted Power Supply*) yang dapat menggantikan sumber listrik dari baterai ketika pasokan listrik dari PLN padam sehingga printer dapat bekerja walaupun listrik PLN padam.

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi yang digunakan untuk membantu mengolah data, dan dengan penggunaan sistem tersebut banyak kelebihan yang di dapatkan. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Anggraini yang berjudul Sistem Informasi Pembayaran SPP di SMK Negeri 4 Dumai Berbasis SMS Gateway menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem tersebut maka akan mempermudah pekerjaan bendahara dalam pengolahan dan manajemen data pembayaran SPP dan dapat memberikan informasi secara langsung kepada orang tua/wali melalui SMS Gateway (Anggraini, Sofiyani, & Khumaini, 2018). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hesty Kumala Sari yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Web didukung Notifikasi SMS menyimpulkan bahwa sistem informasi pembayaran SPP berbasis web ini dapat berjalan secara valid, praktis dan efisien (Sari, Ambiyar, Sukardi, & Sari, 2022).

Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang di miliki oleh penggunaan sistem informasi yang berbasis komputer dengan mempertimbangkan kondisi lapangan maka di buatlah sistem informasi pembayaran SHP versi 1.0 untuk di aplikasikan di Koperasi Unit Desa Hemat. Untuk memberikan pemahaman pengoperasian sistem informasi yang telah di bangun maka perlu di adakan workshop penggunaan sistem informasi pembayaran SHP versi 1.0 di Koperasi Unit Desa Hemat. Hal ini di maksudkan agar terjadi transfer knowledge yang di miliki oleh para narasumber kepada para pegawai atau staf sehingga penggunaan sistem informasi pembayaran ini dapat maksimal dan hasil dari pengabdian masyarakat yang di lakukan oleh para dosen dapat di manfaatkan dan di adopsi oleh masyarakat yang menjadi objek ataupun mitra pengabdian masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Sisa hasil produksi merupakan nilai yang dibayarkan kepada anggota aktif sebuah organisasi setelah di kurangi dengan biaya produksi. Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP) Koperasi Unit Desa Hemat dilakukan setiap pertengahan bulan. Sisa Hasil Produksi (SHP) yang dibagikan kepada anggota merupakan jumlah hasil panen kelapa sawit di kurangi dengan biaya produksi mulai dari perawatan lahan, panen, pemeliharaan, pengangkutan, pemupukan dan lain sebagainya. Sehingga besaran nilai yang terima oleh anggota merupakan nilai bersih yang telah di kurangi biaya produksi.

Koperasi berasal dari bahasa inggris *co-operation, cooperative* atau bahasa latin *coopere*, atau dalam bahasa belanda *cooperatie* yang berarti bekerja sama. Pada tahun 1958 kata koperasi dalam bahasa Indonesia dengan dua huruf o tetapi berdasarkan undang-undang No. 79 tahun 1958 kata koperasi telah diubah menjadi koperasi. Koperasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama-sama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis (Hasan, Supatminingsih, & Ahmad, 2021).

Dalam membangun ekonomi pedesaan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berupa Instruksi Presiden (Inpres) yang bersifat dinamis dan materi pengaturannya dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi lingkungan yang ada. Pada awal pembangunan KUD, partisipasi masyarakat pedesaan relatif rendah. Hal ini dikarenakan jeratan kemiskinan dan keterbelakangan yang merupakan warisan penjajahan di masa lampau. Pemerintah memprakarsai dan memacu pembangunan KUD secepatnya menjadi badan usaha yang mandiri dan tangguh serta mensejajarkan dirinya dengan pelaku atau badan ekonomi dan usaha lainnya. Kebijakan dan strategi pembangunan KUD disusun secara terencana, terarah dan terpadu dengan tetap memperhatikan potensi dan aspirasi masyarakat pedesaan. Peran pemerintah didasarkan oleh keinginan untuk mempercepat tumbuh kembang KUD yang pada awal pendiriannya masih kecil dan lemah baik dari skala usaha maupun pengelolaannya.

Sebagai program pertama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan adalah program bimbingan masal (Bimas) dengan memerankan koperasi pertanian sebagai penyalur kredit bimas bagi petani. Dengan kondisi koperasi pada saat itu umumnya berskala kecil, menjadikan peranan koperasi dalam program bimas kurang efektif dan efisien.

Melalui inpres No. 4 tahun 1973 tentang unit desa, di mana keikutsertaan koperasi dalam pembangunan dipertegas dengan diterapkannya konsep Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai bentuk badan hukum pembangunan koperasi dengan mengembangkan usahanya merupakan landasan operasional dalam membina koperasi di pedesaan.

Pembangunan koperasi dikaitkan dengan pembangunan pertanian. Dengan demikian inpres No. 4 tahun 1973 merupakan tonggak yuridis keberadaan KUD, yang di dalamnya terkandung beberapa konsep strategis yaitu unit desa merupakan kesatuan agroekonomis dalam satu wilayah, yang dibina dan dibentuk dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Mempunyai fungsi-fungsi penyuluhan pertanian, pengkreditan, penyaluran sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Wilayah unit desa dapat mencakup satu atau beberapa desa dalam satu wilayah atau lebih wilayah kecamatan di dalam satu kabupaten dengan luas areal persawahan yang berkisar antara 600 sampai 100 hektar. Fungsi KUD melaksanakan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, secara bertahap ditingkatkan sehingga pada gilirannya mampu melaksanakan fungsi penyuluhan, pengkreditan, dan penyaluran sarana produksi yang sebelumnya merupakan fungsi dari unsur-unsur unit desa lainnya seperti Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Bank Rakyat Indonesia, pengecer, dan warung unit desa. BUUD merupakan lembaga ekonomi unit desa yang bergabung dan melebur dalam KUD.

Dalam Inpres No. 2 tahun 1978 tentang BUUD/KUD sebagai penyempurnaan dari Inpres No. 2 tahun 1973 di mana landasan usaha KUD diperluas menjadi daerah pedesaan sebagai suatu kesatuan potensi ekonomi. Usaha ekonomi KUD yang semula berorientasi pada wilayah unit desa diubah menjadi berorientasi pada potensi ekonomi pedesaan. Selain itu, harapan BUUD/KUD adalah daerah wilayah pedesaan sebagai satu kesatuan ekonomi tersendiri maka BUUD/KUD yang tadinya merupakan koperasi pertanian yang serba usaha pada tahap selanjutnya berubah menjadi koperasi aneka usaha (Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1978).

Selanjutnya untuk memampukan KUD sehingga dapat berdiri di atas kemampuannya sendiri, maka pemerintah mengeluarkan inpres No. 4 tahun 1984 tentang pembinaan pengembangan KUD, sebagai penyempurnaan dari Inpres No. 2 tahun 1978, sejak itu peran BUUD digantikan oleh Badan Pembimbing dan Pelindung KUD. Di bidang usaha KUD diberi kesempatan usaha seluas-luasnya dan pemerintah menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi peningkatan pelayanan kepada anggotanya (Instruksi Presiden No. 4 tahun 1984 tentang pembinaan pengembangan KUD).

Dalam inpres tersebut di pertegas peranan KUD sebagai pusat pengembangan wilayah perekonomian pedesaan. Materi inpres No. 4 tahun 1984 pada dasarnya merupakan langkah pemerintah untuk lebih menyempurnakan konsep KUD dan memberikan bantuan kepada KUD agar lebih mampu berdiri sendiri sebagai organisasi yang mandiri. Melalui inpres No. 4 tahun 1984 maka fungsi KUD sebagai koperasi Pertanian Serba Usaha ditingkatkan menjadi Koperasi Pedesaan Serba Usaha. KUD ditetapkan sebagai satu-satunya koperasi di pedesaan yang anggotanya terdiri dari seluruh warga desa. Sebagai konsekuensinya, KUD harus mampu mengelola seluruh kegiatan ekonomi pedesaan untuk melayani warga desa yang menjadi anggotanya.

Pada tahun 1992 sampai Desember 1996 terdapat 9226 KUD dengan anggota 13,667 juta orang yang tersebar di 3549 kecamatan atau 9,4 persen. Dari jumlah tersebut terdapat 6720 unit KUD Mandiri dan KUD Mantap. Di samping itu di setiap kabupaten telah berhasil dikembangkan paling sedikit satu KUD mandiri inti yang berfungsi sebagai lokomotif pertumbuhan koperasi di daerah sekitarnya. Seluruh KUD mandiri telah memiliki manajer yang pada umumnya lulusan perguruan tinggi (sarjana). Dari keberhasilan di atas, kita menyadari bahwa KUD belum tumbuh di semua desa yang jumlahnya lebih dari 50.000 desa termasuk beberapa desa yang berada di daerah terpencil. Namun dengan jumlah yang ada sekarang, KUD telah memberikan sumbangan yang berarti bagi kegiatan ekonomi di pedesaan.

Pelaksanaan program pelatihan ini berlangsung selama 2 hari dari pukul 08.00-11.00 WIB karena keterbatasan waktu dari para peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini. pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kantor Unit Desa Hemat. Dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Persiapan dan perencanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Budi Darma untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan.
2. Mengirimkan surat permohonan kepada Ketua Pengurus Koperasi Unit Desa Hemat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara tatap muka selama 2 hari.
3. Menjadwalkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan waktu dan jumlah peserta yang telah disepakati.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh tempat dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini. panitia telah menyiapkan satu buah laptop yang bertindak sebagai server dan satu buah laptop yang bertindak sebagai client yang sudah terhubung melalui jaringan lokal menggunakan kabel UTP. Dengan demikian maka para peserta workshop dapat langsung melakukan simulasi cara penggunaan Sistem Informasi Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP) Versi 1.0 Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Hemat.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan transfer knowledge agar para pengurus KUD Hemat dapat menggunakan Sistem Informasi Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP) Versi 1.0 pada Koperasi Unit Desa (KUD)

Hemat dengan baik dan benar. Setiap awal dimulai dengan presentasi dari pemateri dengan memberikan dasar-dasar implementasi Sistem Informasi Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP) Versi 1.0 pada Koperasi Unit Desa (KUD) Hemat dengan menjelaskan kebutuhan minimal sistem agar dapat berjalan dengan benar atau sering disebut dengan minimum requirement. Sehingga di kemudian hari jika ingin melakukan penggantian unit laptop dapat mengetahui laptop dengan spesifikasi seperti apa yang dapat mengakomodasi kebutuhan dari Sistem Informasi Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP) versi 1.0 pada Koperasi Unit Desa (KUD) Hemat.

Setelah menjelaskan minimum requirement selanjutnya menjelaskan komponen pendukung agar sistem dapat berjalan dengan lancar. Komponen pendukung ini merupakan bagian dari software seperti XAMPP yang bertindak sebagai server lokal. Selanjutnya dilakukan praktikum penggunaan Sistem Informasi Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP) versi 1.0 di mulai dengan penginputan data pada form master sampai pembuatan transaksi hingga dengan pencetakan laporan pembayaran Sisa Hasil Produksi.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada para pengurus Koperasi Unit Desa Hemat untuk dapat menggunakan Sistem Informasi Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP). Materi pengabdian masyarakat ini disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Unit Desa Hemat dengan memanfaatkan fasilitas yang terdapat pada Koperasi tersebut. Selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berperan strategis dan taktis untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para pengurus Koperasi Unit Desa Hemat.

3.1 Penjelasan Kegiatan

Peserta pelatihan adalah para pengurus Koperasi Unit Desa Hemat berjumlah 8 orang yaitu, 1 orang Ketua pengurus, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara dan 1 orang dari bagian simpan pinjam, 1 orang bagian humas, 1 orang wakil ketua dan 2 orang siswa PKL. Program pelatihan kepada masyarakat selama 2 hari yaitu tanggal 12-13 September 2022 pada pukul 08.00-11.00 WIB dan berlokasi di Kantor Koperasi Unit Desa Hemat di Kecamatan Sinunukan IV, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Tingkat Pemahaman Tentang Kegiatan Yang Berlangsung

Dengan mengetahui dan memahami langkah-langkah untuk melakukan penggunaan Sistem Informasi Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP) para pengurus Koperasi Unit Desa Cahaya tidak perlu lagi melakukan pencatatan transaksi secara manual ke buku anggota, pencetakan buku anggota dapat dilakukan melalui sistem yang telah dibangun. Pengabdian kepada masyarakat khususnya kepada para pengurus Koperasi Unit Desa Hemat ini terbilang cukup sukses melakukan transfer knowledge ditandai dengan kemampuan para pengurus untuk mengoperasikan Sistem Informasi pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP).

4. KESIMPULAN

Dari kegiatan Workshop Penggunaan Sistem Informasi Pembayaran SHP Versi 1.0 Koperasi Unit Desa (KUD) Hemat dapat disimpulkan bahwa Tim pelaksana telah berhasil melakukan transfer knowledge tentang pengoperasian Sistem Informasi Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP) versi 1.0 kepada para pengurus Koperasi Unit Desa Hemat. Para peserta pelatihan sangat antusias mengikuti pelatihan yang dilaksanakan dan memiliki respons yang positif dikarenakan pelatihan tersebut berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi dan peserta pelatihan mampu memahami materi yang diberikan karena di kemas untuk dapat dengan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S., Sofiyani, A., & Khumaini, H. (2018). Sistem Informasi Pembayaran SPP di SMK Negeri 4 Dumai Berbasis SMS Gateway. *Jurnal Informatika Manajemen dan Komputer*, *X*(2), 66-72.
- Asinjery. (2020). *Konsep Sistem Informasi*. Penayang.
- Hasan, M., Supatminingsih, T., & Ahmad, I. S. (2021). *Koperasi & UMKM*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1978. (t.thn.).
- Instruksi Presiden No. 4 tahun 1984 tentang pembinaan pengembangan KUD. (t.thn.).
- Sari, H. K., Ambiyar, Sukardi, & Sari, D. S. (2022). Pengembangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis Web. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, *VII*(2), 107-112.